

LHKPN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

08.47



2022



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADNAN D. KASIM
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 203839

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	605.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1188 m2/100.5 m2 di LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 315.000.000		
2. Tanah Seluas 5000 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/35 m2 di LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 165.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, NISSAN SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
2. MOTOR, SUSUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.754.901
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	743.954.901
III. HUTANG	Rp.	108.575.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	635.379.901

Catatan:



2022



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BURHANUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 426257

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	845.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 639 m2/330 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 2025 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
3. Tanah Seluas 1400 m2 di LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SUZUKI UK. 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.924.306
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	904.424.306
III. HUTANG	Rp.	485.917.676
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	418.506.630

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LHKPN KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. RAHMAT RESKI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHHK : 242844

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/96 m2 di LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	43.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	449.500.000
III. HUTANG	Rp.	158.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	291.300.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAERUDDIN KOPPA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 718712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 510.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/90 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 37.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SY 415 BALENO GX1490 / SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NEW MIO BLUE CORE (SE88) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.072.092

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 565.972.092

III. HUTANG Rp. 241.234.844

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 324.737.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.